

## LANGKAH STRATEGIS TIONGKOK DALAM NORMALISASI HUBUNGAN ARAB SAUDI-IRAN DI TIMUR TENGAH

Asep Kamaluddin Nashir

Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Pembangunan Nasional  
Veteran Jakarta

asepkamaluddin@upnvj.ac.id

### **Abstract**

*This paper aims to analyze China's strategic moves to achieve mutual concession in the issue of normalizing relations between Saudi Arabia and Iran. Furthermore, this paper explains the change from enmity to friendship between Saudi Arabia and Iran, explaining China's strategic foreign policy moves in the Middle East. The concepts of foreign policy, diplomatic bargaining, and enmity-amity are used to analyze the issues raised in this paper. Certain international reports and analyses, as well as some official documents and literature, will be obtained to collect some data to provide an overview of the focus of the analysis as described by qualitative research focusing on literature study. The main findings in this analysis explain that foreign policy supported by economic capabilities has encouraged China's foreign policy to expand the scope of partnerships that affect economic, political, and security developments in the Middle East through the stages of diplomacy to improve China's bargaining position. This not only provides space for China to contribute to the Middle East but also at the same time provides China with space to expand its influence while increasing the competitive side in the competition between China and the US in the Middle East. The results of this paper emphasize the need of a foreign policy direction that in line with the national interests and supported by diplomatic skills is needed to increase the role and global contribution regarding the national strategic interest.*

**Keywords:** Foreign Policy, Normalization, China, Saudi Arabia, Iran

### **PENDAHULUAN**

Arab Saudi dan Iran mengumumkan normalisasi hubungan yang ditengahi oleh Tiongkok, melalui pernyataan trilateral bersama yang menyebutkan bahwa kesepakatan telah dicapai antara Kerajaan Arab Saudi dan Republik Islam Iran. Pernyataan tersebut mencerminkan niat “untuk melanjutkan hubungan diplomatik di antara mereka dan membuka kembali kedutaan dan misi mereka dalam jangka waktu tidak lebih dari dua bulan”, serta menghormati “kedaulatan negara dan tidak adanya campur tangan dalam urusan dalam negeri negara.” Selain itu, kedua belah pihak juga sepakat untuk melaksanakan dua perjanjian bilateral, yaitu Perjanjian Umum Kerjasama Bidang Ekonomi, Perdagangan, Investasi, Teknologi, Ilmu

Pengetahuan, Kebudayaan, Olahraga, dan Pemuda, serta Perjanjian Kerja Sama Keamanan yang ditandatangani pada tahun 2017. masing-masing pada tahun 1998 dan 2001. Sebelumnya, tidak ada perjanjian yang dilaksanakan karena Riyadh dan Teheran membekukan hubungan pada tahun 2016 setelah mereka berada di pihak yang berlawanan dalam konflik di Yaman dan Suriah (Jash, 2023).

Hal ini menjadi awal baru hubungan kedua negara yang diinisiasi oleh Tiongkok. Melalui kebijakan luar negerinya, Tiongkok melakukan langkah diplomasi untuk melakukan normalisasi hubungan antara Arab Saudi-Iran yang telah lama berkonflik di Timur Tengah. Di sisi lain, nilai strategis Timur Tengah terkait dengan kepemilikan sumber daya minyak yang menjadi kebutuhan banyak negara seperti Tiongkok dan AS, serta persaingan pengaruh antara kedua negara di level global, mendorong Tiongkok untuk melakukan berbagai strategi untuk mencapai kepentingan nasionalnya.

Karena itu, tulisan ini bertujuan untuk menganalisa langkah strategis Tiongkok untuk mencapai *mutual concession* dalam isu normalisasi hubungan Arab Saudi dan Iran. Lebih lanjut, tulisan ini menjelaskan perubahan pola permusuhan menjadi pertemanan antara Arab Saudi dan Iran yang menjelaskan langkah strategis kebijakan luar negeri Tiongkok di Timur Tengah.

### **Pola Hubungan *Amity-Enmity***

Pola pertemanan dan permusuhan pada dasarnya merupakan variabel independen. Polaritas mungkin mempengaruhi, namun tidak menentukan, karakter hubungan keamanan (Buzan & Wæver, 2003: 4) Pola-pola pertemanan dan permusuhan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor latar belakang seperti sejarah, budaya, agama, dan geografi, namun sebagian besarnya bergantung pada isu-isu tersebut dan dengan demikian menjadi penjelasan terbaik bagi pola-pola tersebut (Buzan & Wæver, 2003: 50). Tidak ada pola pertemanan dan permusuhan yang terbentuk di antara negara-negara, kecuali kecurigaan tradisional dan persaingan untuk mendapatkan kepemimpinan dan pengaruh di kawasan (Buzan & Wæver, 2003: 426).

Buzan dan Waever secara eksplisit (dan sekilas) menyebutkan kemungkinan mengkonseptualisasikan pertemanan dan permusuhan dalam istilah yang mirip dengan “budaya anarki” Wendt, dan lebih khusus lagi menyebutkan kategori “formasi konflik”, “rezim keamanan” dan “komunitas keamanan”, sepadan dengan anarki Hobbesian, Lockean, dan Kantian karya Wendt yang diatur oleh hubungan 'permusuhan', 'persaingan', dan pertemanan (Oskanian, 2010: 47-48).

Variabel pertemanan/permusuhan dalam kaitannya dengan 'spektrum' 'budaya anarki' regional yang berbeda. “Budaya anarki” ini dapat dianalisis dari dua perspektif: makro – dalam hal pola perilaku yang terbuka – dan mikro – dalam hal wacana, termasuk wacana keamanan. Pada titik berbeda dalam spektrum ini, pola makro (interaksional) dan mikro (diskursif) ini akan memiliki tingkat kompatibilitas yang berbeda-beda. Di satu sisi, interaksi makro yang dangkal antar negara akan bersifat bermusuhan atau bersahabat. Di sisi lain, wacana mutualisme mereka yang lebih dalam akan mencerminkan pertemanan atau permusuhan, antara lain melalui pola sekuritisasi/desekuritisasi yang saling menguntungkan. Pola sekuritisasi/desekuritisasi ini sebagian besar akan bergantung pada konvergensi atau divergensi kedua jenis wacana yang diuraikan di atas (Oskanian, 2010: 55).

Yang pertama dan terpenting, pertanyaan tentang pertemanan dan permusuhan sebagai masalah solusi yang melekat pada regionalisme memerlukan pertanyaan mengapa harus bekerja sama dan berintegrasi. Jawabannya adalah pencarian solusi yang ditemukan dalam saling ketergantungan. Mereka sama sekali tidak bercita-cita untuk mengubah karakteristik dasar kenegaraan dalam perspektif realis, namun menjadikannya bermanfaat, dan dengan melakukan hal tersebut, kecurigaan, ketakutan, persahabatan sejati, dan dukungan terhadap diri mereka sendiri harus menjadi pendorong kerja sama dan integrasi di tingkat negara secara regional dibandingkan dalam sistem global yang lebih besar (Otieno Juma, 2022: 61). Normalisasi hubungan Arab Saudi-Iran menjelaskan perubahan pola permusuhan menuju pertemanan yang

mempengaruhi dinamika keamanan di Timur Tengah mengingat sebelumnya pola permusuhan kedua negara mempengaruhi dan menentukan pola sekuritisasi dan desekuritisasi kawasan.

### **Kerangka *Foreign Policy Action Dan Diplomatic Bargaining***

Dalam kebijakan luar negeri sebuah negara, para pengambil kebijakan akan sangat realistis dalam menentukan berbagai kriteria kebijakan luar negeri yang menggambarkan akurasi penilaian terhadap tujuan yang ingin dicapai dengan menggunakan kekuatan yang relevan. Tujuan (*ends*) dan kekuatan (*means*) yang digunakan untuk mencapai tujuan merupakan upaya untuk menjaga asa dalam memenuhi kepentingan nasional (John Lovell 1970: 296-297).

Salah satu alasan mengapa jumlah besar sumber daya tidak dapat disamakan dengan pengaruh efektif adalah karena perbedaan antara kemampuan suatu negara secara keseluruhan dan relevansi sumber daya terhadap situasi diplomatik tertentu. Variabel kedua yang menentukan pengaruh adalah sejauh mana terdapat kebutuhan antara kedua negara dalam setiap hubungan pengaruh. Variabel ketiga adalah agenda internasional dan kebijakan luar negeri. Pemerintahan yang mempunyai studi teknis, mempunyai pemahaman penuh terhadap permasalahan yang ada, dan siap memberikan solusi yang realistis, kemungkinan besar akan mempunyai pengaruh (Holsti, 1992: 122-123).

Tiga alasan strategis di atas menjelaskan kemampuan kebijakan luar negeri sebuah negara dalam mempengaruhi perilaku dan kebijakan negara lain berdasarkan kepentingan dan tujuan strategis. Dengan kata lain, kebijakan luar negeri sebagai instrumen dalam menjalankan kebijakan politik di level internasional untuk berinteraksi dengan negara (aktor) lain, juga dapat digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi perilaku negara lain berdasarkan kepentingan yang ingin dicapai.

Memahami dinamika hubungan kekuasaan di tingkat internasional akan relatif mudah jika relevansi sumber daya, kredibilitas, kebutuhan, dan pengetahuan merupakan satu-satunya variabel yang terlibat (Holsti, 1992:

124). Kebijakan luar negeri yang digunakan sebagai instrumen nasional untuk mempengaruhi perilaku negara lain dijalankan melalui *diplomatic bargaining*.

Sebagai instrumen kebijakan, *diplomatic bargaining* dijalankan melalui proses negosiasi untuk menemukan solusi dari persoalan yang dihadapi. Dalam *diplomatic bargaining*, sebagian besar taktik yang baru saja dijelaskan digunakan terutama dalam situasi di mana suatu pemerintahan berupaya mengubah tindakan dan kebijakan negara lain, yakni membujuk mereka melakukan apa yang tidak akan mereka lakukan jika tidak melakukan hal tersebut. Sebaliknya, penyelesaian masalah adalah proses di mana dua pihak atau lebih berupaya mengembangkan aturan untuk menangani beberapa masalah yang timbul dalam lingkungan fisik atau diplomatik. Sedangkan dalam situasi tawar-menawar, kondisi *zero-sum* berlaku – keuntungan satu pihak dipandang sebagai kerugian bagi pihak lain – dalam penyelesaian masalah, para pihak umumnya melihat bahwa studi bersama atas suatu masalah, pengumpulan sumber daya, dan kerja sama umum dapat menghasilkan hasil yang sama. saling menguntungkan dan tidak ada nilai-nilai utama yang harus dikorbankan untuk mencapai kesepakatan (Holsti, 1992: 152).

Pemecahan masalah biasanya menekankan keuntungan yang harus dicapai melalui kesepakatan bersama; dan diplomasi menekankan bahwa pada dasarnya demi kepentingan nasional, pengorbanan jangka pendek demi keuntungan jangka panjang lebih besar. Hal yang perlu ditekankan adalah bahwa, dari semua kontak diplomatik antar pemerintah, dan antara pemerintah dan organisasi internasional, penyelesaian masalah lebih mendominasi (Holsti, 1992: 152).

Dengan *diplomatic bargaining*, hubungan antar satu antar dengan aktor lainnya terlibat dalam interaksi dimana hubungan jangka panjang menjadi jaminan dalam menjalankan diplomasi dimana penawaran terhadap keuntungan yang tidak mengorbankan kepentingan lain mendorong keuntungan jangka panjang.

## **Normalisasi Hubungan Arab Saudi-Iran Di Timur Tengah**

Baik Arab Saudi dan Iran telah menjadi rival di kawasan ini sejak lama. Dapat dikatakan bahwa persaingan mereka merupakan salah satu kompleksitas regional yang paling penting, yang telah mempengaruhi sejumlah negara di Timur Tengah. Salah satu negara yang terkena dampak persaingan ini adalah Yaman. Dengan memulihkan hubungan antara Arab Saudi dan Iran yang akan membuka pintu lebar-lebar bagi dialog antara kedua negara untuk menyelesaikan krisis Yaman, karena kedua negara memiliki banyak kartu yang dapat digunakan untuk mendorong kedua pihak yang bertikai untuk duduk bersama. guna mencapai kesepakatan untuk mengakhiri konflik dan perang saudara Yaman yang telah berkecamuk selama lebih dari delapan tahun (Azby, 2023: 32).

Dalam konteks hubungan Arab Saudi dan Iran, interaksi permusuhan atau permusuhan antar kedua negara telah berjalan dalam rentang waktu yang cukup lama. Salah satunya adalah Arab Saudi memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Iran pada Januari 2016 setelah pengunjuk rasa Iran yang marah menyerbu kedutaan besarnya di Teheran menyusul eksekusi seorang ulama terkemuka Syiah di Riyadh.

Namun, kehadiran Tiongkok dalam hubungan permusuhan Arab Saudi-Iran telah memberikan pengaruh besar dalam hubungan kedua negara. Hubungan kedua negara berubah total dari pola permusuhan terutama dalam persaingan regional, pengaruh serta konflik-konflik di kawasan menjadi kemitraan dalam berbagai aspek bernegara, baik secara politik maupun ekonomi.

Hal itu diawali dengan adanya peristiwa besar yang terjadi di Beijing pada 10 Maret 2023, di mana Tiongkok menjadi mediator rekonsiliasi antara Iran dan Arab Saudi. Kedua negara tersebut merupakan negara yang sangat penting di Timur Tengah sebagai wajah dari kedua sekte Islam; Arab Saudi menjadi wajah sekte Islam Sunni dan Iran menjadi wajah sekte Islam Syiah. Kedua sekte tersebut menghadapi persaingan besar di kawasan Timur Tengah, hingga beberapa negara menghadapi perang sektarian antara Sunni dan Syiah. Hal ini dapat didefinisikan sebagai salah satu kompleks

keamanan regional yang besar di kawasan, namun mediasi yang dilakukan oleh Tiongkok dapat berarti bahwa kompleks keamanan di kawasan ini berada di ambang kestabilan (Azby, 2023, 31). Dengan perkembangan pola pertemanan maka dimulailah era baru hubungan Arab Saudi-Iran terutama dalam interaksi regional di Timur Tengah. Hal ini menjelaskan perubahan drastis dinamika ekonomi, politik, dan terutama keamanan di regional tersebut.

Sebagai contoh, dengan memulihkan hubungan Saudi - Iran, meningkatkan peluang kerja sama ekonomi dan komersial guna mencapai pembangunan dan kesejahteraan bagi masyarakat di kawasan secara keseluruhan: Menyelesaikan perselisihan dan perselisihan di kawasan pada umumnya, dan Arab Saudi dan Iran pada khususnya, akan membantu mencapai pembangunan berkelanjutan melalui apa yang memungkinkan untuk merangsang perdagangan dan investasi bersama. Kedua negara memiliki potensi ekonomi dan sumber daya minyak yang besar (Trend Research & Advirsory, 2023).

Meskipun janji investasi Tiongkok mungkin berpotensi meningkatkan peluang implementasi, proses pencapaian kesepakatan pada dasarnya merupakan proses regional. Ketegangan antara kedua belah pihak memuncak pada tahun 2019, ketika setengah dari produksi minyak Arab Saudi dihancurkan oleh serangan pesawat tak berawak dan rudal yang diduga didukung oleh Iran. Negosiasi dimulai secara diam-diam pada tahun 2021, dimediasi oleh perdana menteri Irak saat itu, Mustafa al-Kadhimi, yang mendapat dukungan dari kedua belah pihak, namun terhenti ketika al-Kadhimi digantikan oleh Mohammad Shia al-Sudani pada bulan Oktober 2022. Ketegangan berkobar naik dan turun berulang kali selama beberapa bulan terakhir, ketika kedua belah pihak berjuang untuk menemukan jalan ke depan yang dapat diterima. Menurut Saeed Azimi, seorang jurnalis yang berbasis di Teheran, Saudi, yang frustrasi dengan lambatnya negosiasi di Bagdad, menghubungi Tiongkok selama kunjungan Xi Jinping pada bulan Desember 2021 dan meminta mereka untuk menjadi mediator. Iran rupanya

menerima tawaran tersebut saat kunjungan Raisi pada Februari 2022 (Figueroa, 2023).

Setelah tujuh tahun ketegangan antara kedua negara Teluk, Arab Saudi dan Iran melanjutkan hubungan diplomatik setelah melakukan negosiasi di kantor baik Beijing pada 6-10 Maret. Terobosan diplomatik yang dilakukan Beijing ini menandai upaya terbaru dalam menormalisasi hubungan antara Arab Saudi dan Iran. Seperti yang diakui dalam pernyataan tersebut, Irak dan Oman menjadi tuan rumah beberapa putaran dialog antara Riyadh dan Teheran selama tahun 2021 dan 2022, yang memfasilitasi dimulainya kembali hubungan diplomatik antara Arab Saudi dan Iran (Jash, 2023).

## **PEMBAHASAN**

### **Agenda Internasional Dalam Kebijakan Luar Negeri Tiongkok di Timur Tengah**

Kawasan Timur Tengah yang kaya energi mempunyai kepentingan strategis yang sangat besar dalam mendorong dan mempertahankan pembangunan ekonomi Tiongkok. Tiongkok menjadi importir minyak terbesar kedua setelah Amerika Serikat pada tahun 2012. Pada tahun 2015, Tiongkok mengimpor sejumlah besar 6,7 juta barel per hari dan diperkirakan akan segera menyalip Amerika Serikat sebagai importir minyak mentah terbesar di dunia pada tahun 2012. tahun-tahun mendatang. Prediksi ini terbukti benar dan pada akhir tahun itu, yakni September 2015, impor minyak mentah Tiongkok mencapai rekor 8,04 juta barel per hari melampaui Amerika Serikat sebagai pembeli utama minyak asing yang pada saat itu mencapai 7,98 juta barel per hari (Javaid & Waheed, 2016: 325).

Dengan meningkatnya kehadiran Tiongkok di Timur Tengah, terutama dalam berbagai isu politik, ekonomi, dan keamanan yang melibatkan dua negara besar dan berpengaruh di Timur Tengah, menjelaskan besarnya peran dan partisipasi Tiongkok dalam mempengaruhi dinamika perkembangan di kawasan tersebut. Hal itu menjelaskan cakupan partisipasi Tiongkok yang kini meluas ke kawasan Timur Tengah.

Tiongkok telah membangun hubungan yang kuat dengan aktor-aktor utama di kawasan ini dan, seiring berjalannya waktu, telah memperkuat hubungan ekonominya dengan mereka. Investasi kumulatifnya di Iran dari tahun 2005 hingga 2012 diperkirakan mencapai \$18,6 miliar, termasuk \$13,9 miliar di sektor energi, 2,1 miliar di bidang transportasi, dan 2,8 miliar di bidang logam. Tiongkok berinvestasi sekitar \$13,6 miliar di Arab Saudi, dengan \$5,2 miliar di bidang logam, \$3,3 miliar di bidang energi, \$2,2 miliar di bidang real estate, dan sisanya di bidang transportasi dan bidang lainnya. Di Turki, \$4,3 miliar dari \$6,4 miliar investasi Tiongkok disalurkan ke sektor energi. Tiongkok menjadi investor asing terbesar di Irak dan Iran. Seperti yang dilakukan banyak negara di Afrika, pemerintah Timur Tengah telah mendatangkan kontraktor Tiongkok untuk mengerjakan proyek infrastruktur besar. Sebagai dimensi yang menarik dari kebijakan luar negeri Tiongkok di kawasan, hubungan dengan Iran dan Arab Saudi, dua aktor kunci di kawasan Timur Tengah yang saling bersaing memerlukan perhatian khusus. Tiongkok telah berhasil menangani Iran dan Arab Saudi meskipun ada persaingan regional yang sangat sengit di antara mereka (Javaid & Waheed, 2016: 326).

Sedangkan bagi Arab Saudi, aktor utama di kawasan Timur Tengah, Tiongkok secara bertahap dan hati-hati telah membangun hubungan bilateral yang kuat dan kini dianggap sebagai pengganti dan alternatif bagi Amerika Serikat. Landasan kerja sama Tiongkok -Saudi adalah energi, dan ini memiliki alasan yang bagus: Arab Saudi adalah eksportir minyak terbesar di dunia dan Tiongkok adalah importir minyak terbesar di dunia. Tidak mengherankan jika kedua negara tertarik untuk memperdalam kerja sama satu sama lain di bawah garis besar strategis “Satu Sabuk, Satu Jalan” yang dikemukakan oleh Presiden Tiongkok Xi Jinping dan program “Visi 2030” yang dikemukakan oleh Pangeran Salman. Tiongkok juga berupaya untuk meningkatkan statusnya di Timur Tengah, sementara Arab Saudi berupaya untuk melindungi nilai-nilainya di dunia multi-kutub, terutama ketika Amerika Serikat tampaknya kurang bersedia bertindak sebagai penjamin keamanan Arab Saudi (Javaid & Waheed, 2016: 327).

Meningkatnya agenda internasional Tiongkok melalui kebijakan luar negerinya untuk terlibat aktif di Timur Tengah menjelaskan arah perluasan kepentingan nasional negara tersebut, baik menjadi negara yang ikut terlibat secara ekonomi, politik dan keamanan serta memberikan dan meningkatkan sisi kompetitif antara Tiongkok dan AS dalam mendapatkan pengaruh global.

Tiongkok telah mengejutkan Timur Tengah dan dunia dengan mencapai terobosan diplomatik yang tidak terduga. Wang Yi, diplomat tertinggi Tiongkok dan direktur Kantor Urusan Luar Negeri Pusat Partai Komunis Tiongkok, menyatakan hal tersebut, saat memimpin upacara penutupan dialog Beijing antara Arab Saudi, Iran dan Tiongkok, bahwa kesepakatan tersebut merupakan kemenangan bagi perdamaian dan diplomasi. Kecaman Arab Saudi-Iran ini telah menjadi praktik sukses Inisiatif Keamanan Global Tiongkok. Kesepakatan Arab Saudi-Iran menunjukkan pengaruh Beijing di kawasan ini meningkat tajam.

Arab Saudi dan Iran sama-sama berterima kasih kepada Tiongkok karena menjadi tuan rumah perundingan perdamaian dan peran kepemimpinannya dalam perundingan tersebut. Presiden Xi Jinping secara pribadi terlibat dalam menengahi perjanjian Arab Saudi-Iran, setelah menyatakan kepada Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman selama kunjungannya ke Riyadh pada bulan Desember 2022 bahwa Beijing dapat memainkan peran “jembatan” antara Arab Saudi dan Iran. Sebelumnya, Tiongkok jarang terlibat dalam penyelesaian konflik regional, baik sebagai mediator maupun pemain eksternal yang dapat mengubah keseimbangan kekuatan di Timur Tengah. Beijing jelas menjadi jauh lebih proaktif dan terbuka dalam kebijakan luar negerinya terhadap wilayah tersebut. Kedua negara kini memandang Tiongkok tidak hanya sebagai mitra perdagangan dan ekonomi yang penting, namun juga sebagai mitra keamanan di kawasan (Yu, 2024: 128).

Yang lebih penting lagi, karena Tiongkok merupakan mitra dagang terbesar dan pembeli energi terbesar bagi Arab Saudi dan Iran, Tiongkok memiliki pengaruh ekonomi untuk mempengaruhi kedua negara. Mereka dapat memanfaatkan pengaruh ini untuk mengambil peran penting sebagai

perantara kekuasaan di Timur Tengah yang secara tradisional dipegang oleh Amerika Serikat. Beijing memiliki rencana geostrategis jangka panjang untuk memasukkan Tiongkok tidak hanya ke dalam bidang ekonomi tetapi juga pengaturan keamanan kawasan secara keseluruhan. Dengan meningkatkan upayanya di kawasan ini, Tiongkok bersaing dengan Amerika Serikat untuk mendapatkan pengaruh di Timur Tengah. Perjanjian yang dicapai di Beijing menunjukkan bahwa Tiongkok memiliki kemampuan untuk memproyeksikan kekuatan dan pengaruh diplomatiknya di luar kawasan Asia-Pasifik. Tiongkok kini menjadi kekuatan yang sangat diperlukan, baik secara politik maupun ekonomi, di kawasan yang secara geostrategis telah lama didominasi oleh Amerika Serikat (Yu, 2024: 128-129).

Meningkatnya partisipasi Tiongkok dalam perkembangan politik, ekonomi, dan keamanan di Timur Tengah jelas menghadirkan perkembangan dinamika baru secara global dimana Tiongkok kini tidak hanya menjadi penonton bagi perkembangan di Timur Tengah, namun menjadi salah satu negara yang menentukan arah politik, ekonomi, dan keamanan Timur Tengah.

### ***Diplomatic Bargaining Tiongkok***

Perjanjian yang dimediasi Tiongkok ini tidak hanya merupakan kemenangan besar bagi diplomasi Tiongkok, namun juga merupakan pukulan besar terhadap kebijakan luar negeri Amerika terhadap Timur Tengah. Hal ini bisa menandakan berkurangnya pengaruh Amerika di wilayah tersebut. Perjanjian Arab Saudi-Iran yang dimediasi Tiongkok menghadirkan sebuah alternatif terhadap tatanan yang dipimpin Washington di wilayah tersebut (Yu, 2024:130).

Negosiasi yang dijalankan Tiongkok untuk memberikan keamanan terutama dengan melibatkan dua negara besar yang mempengaruhi dinamika Timur Tengah, yaitu Arab Saudi dan Iran menjelaskan kemampuan negosiasi Tiongkok dalam membuka ruang taktik untuk meningkatkan keberhasilan diplomasi negara tersebut.

Menurut *Policy Alert* yang baru-baru ini dikeluarkan oleh *Institute Goldberger Fellow Grant Rumley* dan *Institute Senior Fellow Henry Rome*, "Beijing telah mencoba-coba diplomasi Timur Tengah selama bertahun-tahun—yang terbaru melalui perjalanan Presiden Xi Jinping pada bulan Desember untuk memimpin pertemuan puncak regional di Arab Saudi—tetapi dengan sedikit dukungan dari negara-negara tersebut. untuk menunjukkan upayanya (Kinasih & Surwandono, 2023).

Seiring dengan dimulainya abad baru, Tiongkok muncul sebagai aktor dengan kemampuan terbesar dalam hegemoni global. Tahun 2013 dapat ditandai sebagai titik balik kebangkitan negara ini, ketika negara ini mencapai PDB global tertinggi dan Presiden Xi Jinping mengumumkan *Belt and Road Initiative*.

Perekonomian Tiongkok yang sedang berkembang membutuhkan segala jenis sumber daya, termasuk energi, untuk memenuhi permintaan yang besar terhadap produksi dan konsumsi yang terus meningkat. Hal ini berarti mereka harus memperluas pilihan mereka terhadap hubungan dekat, mencari perluasan ke tempat-tempat baru di mana mereka dapat melaksanakan proyek-proyeknya di tiga bidang yang ditandai dengan jelas: politik, komersial (termasuk energi) dan keamanan. Ekspansi Tiongkok sejauh ini berjalan dengan cara yang tampak *soft*, meskipun banyak pemikir Barat menggambarkannya sebagai tindakan yang sabar, mengisyaratkan bahwa suatu saat nanti Tiongkok akan mengubah pendekatan ini (Castro Torres, 2023: 6).

Tiongkok dalam memperkuat posisinya menggunakan strategi *soft-balancing* dibandingkan *hard-balancing*. Strategi penyeimbangan lunak Tiongkok telah berhasil dalam dua cara: dengan mempromosikan lembaga-lembaga multilateral yang tidak mencakup AS dan dengan memperkuat hubungan bilateral dengan negara-negara yang saat ini memiliki hubungan lemah dengan AS atau yang dipandang oleh Tiongkok memiliki potensi atau keinginan untuk melakukan hal tersebut untuk berpaling dari pengaruh AS. Kedua strategi ini terkait erat dengan rencana Tiongkok untuk mengamankan akses sumber daya.

Negara-negara Timur Tengah memiliki sumber pendapatan non-AS di Tiongkok. Sebagian besar wilayah Timur Tengah memiliki sentimen anti-Amerika dalam negeri yang signifikan, dan sebagian besar dari mereka yang tinggal di negara-negara mayoritas Muslim khawatir bahwa pengaruh AS pada akhirnya akan digunakan untuk melawan mereka. Selain menjadi bisnis yang cerdas, menjalin hubungan yang lebih dekat dengan Tiongkok dapat membantu rezim di Timur Tengah mendapatkan lebih banyak dukungan domestik dengan melemahkan hubungan mereka dengan AS (Kinasih & Surwandono, 2023).

Tiongkok hadir sebagai mediator baru yang fleksibel sehingga membuat kredibilitas AS sebagai mediator mulai dipertanyakan karena dianggap tidak dapat diandalkan dan sering memihak dalam konflik. Dengan demikian, dalam mengambil peran sebagai negosiator perdamaian antara Iran dan Saudi, Tiongkok mampu memainkan peran ini karena, meskipun ada sanksi Amerika terhadap Iran, Tiongkok terus menjaga hubungan dengan kedua negara dan membeli minyak dari kedua anggota OPEC.

## **KESIMPULAN**

Permusuhan antara Arab Saudi-Iran telah terjadi dalam rentang waktu yang cukup lama, permusuhan antara kedua negara ini menyebabkan eskalasi konflik dikawasan Timur Tengah. Kehadiran Tiongkok melalui kebijakan luar negerinya untuk terlibat aktif dalam menormalisasi hubungan baik antara Arab Saudi - Iran merupakan agenda internasional Tiongkok yang bertujuan untuk dapat meningkatkan pengaruh Tiongkok dikawasan Timur Tengah, dan meningkatkan sisi kompetisi Tiongkok terhadap AS untuk dapat melemahkan pengaruh AS dikawasan Timur Tengah.

Langkah yang dilakukan Tiongkok untuk dapat menjembatani hubungan Arab Saudi-Iran dilakukan melalui taktik *diplomatic bargaining*, dengan perluasan kepentingan nasional dengan turut terlibat secara ekonomi, politik, dan keamanan di Timur Tengah. Melalui upaya tersebut, Tiongkok berhasil membawa kesepakatan perdamaian dan normalisasi hubungan antara Arab Saudi-Iran yang disepakati dalam dialog Beijing. Dengan begitu Tiongkok turut membuktikan kepada dunia kemampuannya

dalam Inisiatif Keamanan Global Tiongkok, yang menyebabkan pengaruh dari AS berkurang di kawasan Timur Tengah. Kesuksesan Tiongkok juga membawa kemudahan bagi Tiongkok dalam menjalankan rencana geostrategis jangka panjang untuk turut berpartisipasi dalam berbagai bidang seperti ekonomi, keamanan, dan arah politik di wilayah Timur Tengah. Dengan begitu dapat disimpulkan melalui kebijakan luar negeri dan langkah strategis Tiongkok yang berhasil dalam menormalisasi hubungan Arab Saudi-Iran membawa kedudukan Tiongkok lebih unggul dibandingkan Amerika Serikat dalam penyelesaian konflik yang terjadi di Timur Tengah.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Azby, H.R. (2023). *Why is the Arab - Chinese recent cooperation receiving a large global attention , in the current era , and how is this relationship going to have an impact on the rest of the world?.* Aalborg University: *Development and International Relation*, 1–45.
- Buzan, B., & Wæver, O. (2003). *Regions and Powers: The Structures of International Security.* In *Cambridge University Press*.  
<https://doi.org/10.31599/jkn.v2i1.42>
- Figuroa, W. (2023). *Iran Saudi Normalization A Regional Rocess With Chinese Characteristics.* Foreign Policy Research Institute.
- Holsti, K. (1972). *Foreign Policy Actions: Powe, Capabilities, and Influence in International Politics : A Framework of Analysis.* New Jersey: Prentice Hall.
- Jash, A. (2023). *Saudi-Iran Deal: A Test Case of China's Role as an International Mediator.* Georgetown Journal of International Affairs.
- Javaid, U., & Waheed, M. (2016). China's Foreign Policy in the Middle East. *A Research Journal of South Asian Studies*, 31(2), 701–711.  
<https://doi.org/10.4324/9781315548630>
- Kinasih, R. S. A. W., & Surwandono. (2023). Gain Power Through No Power: Effectiveness of China's Roles in Conflict Resolution between Saudi Arabia and Iran Long-Standing Dispute Raden. *Review of International Relations*, 5(2).
- Lovell, J. P. (1970). *Foreign Policy in Perspective: Strategy Adaptation Decision Making.* New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Oskanian, K. (2010). *Weaving Webs of Insecurity: Fear, Weakness and Power in the Post-Soviet South Caucasus Kevork* (Issue September).
- Otieno Juma, D. T. (2022). Amity and Enmity in Regional Integration; the East African Community (EAC) Experience. *International Journal of World Policy and Development Studies*, 8(82), 57–65.

<https://doi.org/10.32861/ijwpds.82.57.65>

Torres, J. I. (2023). China's consolidation in the Middle East. *Institute Espanol de Estudios Estrategicos*, 2-12.

Trends Research & Advisory. (2023, March 11). The return of Saudi-Iranian relations, Dimensions of the agreement and possible repercussions Retrieved from Trendsresearch.org: <https://trendsresearch.org/ar/insight/- عودةالعلاقات-السعودية-الإيرانية-أبع />

Yu, H. (2024). *Asia in Transition 26 Understanding China's Belt and Road Initiative*.